



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Diponegoro Nomor 60 Palangka Raya, 73111 || Telp/fax: (0536) 3221645
website: www.bappeda.kalteng.go.id || email: bappeda.kalteng@gmail.com

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berdasarkan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. YUREN S. BAHAT, MM, MT.

NIP : 19630510 199003 1 014

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka dirasa perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Perubahan Penetapan Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

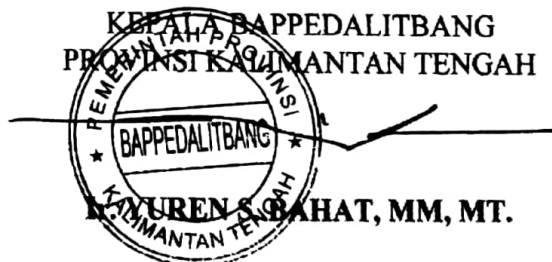
Palangka Raya,

Maret 2017

Mengetahui
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



KEPALA BAPPEDALITBANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

- Unit SKPD : Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
- Tugas : Menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- Fungsi : a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BAPPEDALITBANG;
 b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 e. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan KUA dan PPAS, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD);
 f. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan;
 g. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintahan, antar pemerintah daerah lainnya dengan pusat dan antar lintas pelaku;
 h. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 i. Penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
 j. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
 k. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
 l. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan;
 m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	1.1. Terwujudnya perencanaan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	1. Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021 2. Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKP tahun n+1	$\frac{\text{Jumlah Arah Kebijakan dan Prioritas RKPD sesuai RPJMD}}{\text{Total Arah Kebijakan dan Prioritas RKPD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Arah Kebijakan dan Prioritas RKPD sesuai RKP}}{\text{Total Arah Kebijakan dan Prioritas RKPD}} \times 100\%$	Bappedalitbang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.2	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah	1 Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	$\frac{\text{Jumlah Kajian/Penelitian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kajian/Penelitian}} \times 100\%$	Bappedalitbang
2	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	1 Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 2 Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD 3 Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD 4 Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas RKPD sesuai RPJMD}}{\text{Total Program RKPD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Program Renstra PD sesuai dengan RPJMD}}{\text{Total Program Renstra PD}} \times 100\%$ $\frac{\frac{\text{Jumlah Program Renja PD sesuai dengan Renstra PD}}{\text{Jumlah Program Renja PD}} + \frac{\text{Jumlah Kegiatan Renja PD sesuai dengan Renstra PD}}{\text{Jumlah Kegiatan Renja PD}}}{2} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Program dan Kegiatan Renja PD sesuai dengan RKPD}}{\text{Total Program dan Kegiatan Renja PD}} \times 100\%$	Bappedalitbang
3	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	1 Jumlah SOPD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik) 2 Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	SOPD yang realisasi programnya $\geq 95\%$ $\frac{\text{Jumlah Indikator RPJMD yang Mencapai/Melebihi Target}}{\text{Jumlah Indikator RPJMD}} \times 100\%$	Bappedalitbang

